

# KOORDINASI DINAS PARIWISATA DAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH DALAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN CIAMIS

Azmi Aditiya<sup>1</sup>, Endah Vestikowati<sup>2</sup>, Erlan Suwarlan<sup>3</sup>

Universitas Galuh Ciamis, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

E-mail: yoiazmi15.@gmail.com

## ABSTRAK

*Berdasarkan hasil studi pendahuluan diketahui bahwa masih lemahnya koordinasi lintas sektoral (perangkat daerah) dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Ciamis, seperti halnya koordinasi antar Dinas Kepariwisata dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Ciamis, dalam hal mempublikasikan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Ciamis, dengan terkesan saling menunggu instruksi. Koordinasi yang dibangun oleh Kepala Bidang Pemasaran Dinas pariwisata dengan Ketua Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Ciamis, masih belum dapat terlaksana secara optimal. Hal ini terbukti dengan kurang instensifnya kerjasama antar dua bidang tersebut, sehingga target pengembangan kepariwisataan belum tercapai. Koordinasi yang dibangun lintas sektoral secara horizontal masih perlu ditingkatkan, mengingat sinkronisasi antar kedua lembaga lintas sektoral tersebut belum saling mengisi, dengan demikian maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui koordinasi Dinas Pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam mengembangkan kepariwisataan Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan hasil penelitian sebagai berikut. pelaksanaan proses koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dengan BP2D Kabupaten Ciamis dilaksanakan sesuai dengan teori yang dijadikan tolok ukurnya. Adapun proses yang dimaksud memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Proses kesatuan tindakan, komunikasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, continuity, direct contact, reciprocal relation, mutual respect, clarity of objective, scalar chain, mekanisme, pembagian peran dan kinerja (role of the job sharing), manajemen internal, disiplin dan komitmen pemimpin. Hambatan masing-masing indikator dalam pelaksanaan koordinasi sebagian besar berawal dari sumber daya manusia yang ada pada dua lembaga tersebut yaitu Dinas pariwisata dan BP2D. Sedangkan hambatan lainnya terdiri dari sumber dana, serta sarana prasarana yang ada. Upaya yang selalu dilakukan dalam penyelesaian hambatan masing-masing indikator adalah melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia. Sedangkan masalah dana dilakukan penganggaran dana serta sarana dilakukan terus menerus perbaikan*

**Kata Kunci:** *Koordinasi, Pengembangan, Kepariwisataan.*

## PENDAHULUAN

Di era otonomi daerah seperti saat ini, wilayah pemerintahan yang memiliki aset-aset unggulan seperti pariwisata atau pertambangan jika dikelola dengan baik dapat memberikan pendapatan yang besar bagi daerahnya. Menurut Yoeti dalam Yulesti (2017:246) bahwa “Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lainnya, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna untuk bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi kebutuhan yang beragam. pendapat lain dikemukakan Suryadana dan Vanny (2015:31) “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha”.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Bab I Pasal 1 ; dinyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Salah satu daerah di Indonesia yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan utamanya adalah Kabupaten Ciamis dengan

destinasi wisata yang masih banyak belum di kembangkan. Adapun tujuan jangka panjang kepariwisataan Kabupaten Ciamis adalah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan penataan Destinasi Wisata. Sedangkan tujuan jangka menengah Kepariwisata Kabupaten Camis adalah meningkatkan pembangunan ekonomi inklusif dan berdaya saing. dan tujuan jangka pendek Pariwisata kabupaten Ciamis adalah meningkatkan dan Pengembangan Obyek Wisata, Membangun, mengembangkan serta meningkatkan pembinaan kemitraan terhadap stakeholder pariwisata dan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan daerah; Meningkatkan Produk kepariwisataan yang dikembangkan serta penguatan fungsi stakeholder kepariwisataan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka Dinas Pariwisata melakukan koordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata (BP2D) Kabupaten Ciamis, untuk mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Ciamis. Koordinasi dalam suatu organisasi merupakan pengaturan yang aktif, bukan pengaturan dalam arti pasif berupa membuat aturan mengenai segala gerak dan kegiatan dan kinerja antara atasan dan bawahan yang mempunyai tugas dan kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lainnya, pengaturan mana bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan kegiatan saling bertindih yang dapat mengakibatkan

pemborosan dan pengaruh tidak baik terhadap semangat dan tertib kerja.

Menurut Handoko (2016 : 193) menuliskan, “Koordinasi (*coordination*) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.”.

Sedangkan menurut Menurut Brech dalam Hasibuan (2014:85), “Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. “

Dengan demikian maka kootdonaso merupakan proses pengaturan, memadukan atau pengintegrasian kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa koordinasi antara Dinas Pariwisata dengan Badan Promosi pariwisata kabupaten Ciamis masih belum optimal. Hal ini terbukti dengan adanya indikasi-indikasi sebagai berikut.

1. Masih lemahnya koordinasi lintas sektoral (perangkat daerah) dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Ciamis, seperti halnya koordinasi anatar Dinas Kepariwisata dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Ciamis, dalam hal

mempublikasikan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Ciamis, dengan terkesan saling menunggu instruksi.

2. Koordinasi yang dibangun oleh Kepala Bidang Pemasaran Dinas pariwisata dengan Ketua Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Ciamis, masih belum dapat terlaksana secara optimal. Hal ini terbukti dengan kirang instensfnya kerjasama antar dua bidang tersebut, sehingga target pengembangan kepariwisataan belum terxapai
3. Koordinasi yang dibangun lintas sektoral secara horizontal masih perlu ditingkatkan, mengingat sinkronisasi antar kedua lembaga lintas sektoral tersebut belum saling mengisi.
4. Koordinasi secara fungsional belum saling mengisi dimana masih banyak agenda agenda yang masih sendiri sendiri.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Koordinasi Dinas Pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Dalam Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Ciamis”.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Bentuk dari koordinasi yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Dinas Kehutanan adalah bentuk Koalisi (*coalition*) yakni kombinasi antar dua organisasi yang mempuyai tujuan-

tujuan yang sama. Kedua lembaga tersebut memiliki struktur yang berbeda yang dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu. Akan tetapi kedua lembaga yakni Dinas Pariwisata dan Dinas Kehutanan memiliki maksud utama adalah untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama yaitu dalam pengelolaan obyek wisata taman nasional di kabupaten malinau agar obyek wisata tersebut dapat terjaga dan terawat. keindahan alamnya, serta agar dikenal oleh banyak masyarakat dalam maupun luar negeri. Namun dalam kerjasama tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti hal timbal balik, orientasi individu, dan komunikasi

Adapun unsur proses koordinasi sebagaimana dikemukakan oleh Hartatmo (2015:23) bahwa: “Proses koordinasi mempunyai unsur-unsur penting dalam pelaksanaannya meliputi: kesatuan tindakan, komunikasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, *continuity, direct contact, reciprocal relation, mutual respect, clarity of objective, scalar chain, mekanisme, pembagian peran dan kinerja (role of the job sharing),* manajemen internal, disiplin dan komitmen pemimpin”.

### **Desain Penelitian**

Rancangan pemecahan masalah yang ada dalam suatu penelitian sangat diperlukan untuk melakukan penyelidikan yang hati-hati, teratur dan terus-menerus, sedangkan untuk mengetahui bagaimana seharusnya langkah penelitian harus dilakukan

dengan menggunakan metode penelitian. Metode adalah aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap berhasil tidaknya suatu penelitian, terutama untuk mengumpulkan data. Sebab data yang diperoleh dalam suatu penelitian merupakan gambaran dari obyek penelitian.

Menurut Sugiyono (2012:2) menjelaskan bahwa:

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh.

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci

dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Menurut McMillan & Schumacher (dalam Seocono 2012) bahwa Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.”

Menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2017:6) mengemukakan “Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian langsung. Metode deskriptif menurut

Sugiyono (2009:21) adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Dengan kata lain penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, Dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan deskriptif analisis ialah suatu metode penelitian yang menggambarkan peristiwa (keadaan dan fakta) yang terjadi pada saat penelitian berlangsung selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan alat-alat penelitian.

Alasan penulis memilih metode kualitatif adalah karena penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Koordinasi merupakan suatu proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Adapun unsur proses koordinasi sebagaimana dikemukakan oleh

Hartatmo (2015:23) bahwa: "Proses koordinasi mempunyai unsur-unsur penting dalam pelaksanaannya meliputi: kesatuan tindakan, komunikasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, continuity, direct contact, reciprocal relation, mutual respect, clarity of objective, scalar chain, mekanisme, pembagian peran dan kinerja (role of the job sharing), manajemen internal, disiplin dan komitmen pemimpin".

Untuk mengetahui pelaksanaan Koordinasi sebagaimana dikemukakan Hartatmo (2015:23) tersebut, maka tampak sebagaimana dalam deskripsi berikut:

### **1. Kesatuan tindakan**

Dalam sebuah proses koordinasi, kesatuan tindakan menjadi salah satu dimensi dengan didukung oleh dua indikator yaitu adanya kesadaran tiap unsur organisasi untuk saling menyesuaikan tugasnya dan adanya kesatuan tindakan sehingga adanya keserasian dalam mencapai hasil. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kedua indikator tersebut, maka penulis melakukan wawancara dengan empat orang informan dengan jabatan dan tugas pokok yang berbeda.

### **2. Komunikasi**

Setelah kesatuan tindakan dilaksanakan, maka hasilnya perlu di komunikasikan kepada dua belah pihak agar memperoleh hasil yang optimal. Pelaksanaan koordinasi didukung oleh dua indikator yaitu adanya komunikasi yang harmonis antara Dinas Pariwisata dengan BP2D, dan adanya pembagian

informasi yang merata dari masing-masing organisasi

### **3. Integrasi**

Integrasi merupakan proses penyatuan antara dua instansi yang berbeda dalam pelaksanaan koordinasi. Dimensi integrasi ini didukung oleh dua dimensi yaitu Adanya SOP yang jelas untuk menyatukan dua buah organisasi dan Adanya prosedur pelaksanaan yang dapat dilihat dalam protap. Untuk mengetahui pelaksanaan indikator tersebut.

### **4. Sinkronisasi**

Dimensi Sinkronisasi ini didukung oleh dua dimensi yaitu Adanya kejelasan pembagian tugas dan adanya pemahaman bagi masing-masing organisasi mengenai kejelasan tujuan

### **5. Simplikasi**

Dimensi Simplikasi ini didukung oleh dua indikator yaitu membuat program yang realistis dan sederhana dan membuat program yang dapat di kerjakan.

### **6. Continuity**

*Continuity* atau kesinambungan merupakan salah satu dimensi dalam proses koordinasi. Dimensi *Continuity* ini didukung oleh dua indikator yaitu Melakukan koordinasi yang berkesinambungan dan Proses koordinasi dimulai sejak kerjasama di bangun.

### **7. Direct contact**

*Direct contact* atau kontak langsung dimaksudkan bahwa sebuah koordinasi tidak bisa dilakukan hanya dengan perantara saja, melainkan harus juga melalui kontak langsung. Dimensi

ini didukung oleh dua indikator yaitu Adanya komunikasi langsung antara Dinas Pariwisata dengan BP2D dan Menghindari kesalahpaaman antara Dinas Pariwisata dengan BP2D melalui kontak langsung.

#### **8. *Reciprocal relation***

Resiprocal relation merupakan salah satu hubungan yang saling membutuhkan. Dimensi ini didukung oleh dua indikator Antar anggota merasa saling membutuhkan dan Antar anggota merasa saling berhubungan.

#### **9. *Mutual respect***

Dimensi selanjutnya adalah *mutual respect*. Dimensi ini didukung oleh dua indikator yaitu ada rasa saling menghargai terhadap keseluruhan organisasi dan bagaimana saling menghargai antara pegawai dalam level yang berbeda.

#### **10. *Clarity Of Objective***

Dimensi selanjutnya adalah *Clarity Of Objective*. Dimensi ini didukung oleh dua indikator yaitu Seluruh anggota organisasi mengetahui dengan jelas tujuan organisasi dan memiliki pemahaman yang baik mengenai tujuan organisasi.

#### **11. *Scalar chain***

Dimensi selanjutnya adalah *Scalar chain*. Dimensi ini didukung oleh dua indikator yaitu Adanya garis kewenangan yang tersusun dari tingkat atas sampai tingkat bawah dan adanya laporan yang jelas dari bawahan ke atasan.

#### **12. *Mekanisme***

Dimensi selanjutnya adalah Mekanisme. Dimensi ini didukung

oleh dua indikator yaitu Adanya saling menyesuaikan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya dan adanya standar yang jelas dalam pelaksanaan pekerjaan.

#### **13. *Pembagian peran dan kinerja (role of the job sharing)***

Dimensi selanjutnya adalah Pembagian peran dan kinerja (*role of the job sharing*). Dimensi ini didukung oleh dua indikator yaitu Adanya pembagian kerja antara masing-masing anggota organisasi dan adanya Adanya pembagian tugas yang disesuaikan dengan basik pekerjaannya.

#### **14. *Manajemen internal***

Dimensi selanjutnya adalah manajemen internal. Dimensi ini didukung oleh dua indikator yaitu adanya manajemen internal dalam masing-masing organisasi untuk mempermudah koofinasi dan adanya manajemen internal dalam pelaksanaan pekerjaan .

#### **15. *Disiplin***

Dimensi selanjutnya adalah Disiplin. Dimensi ini didukung oleh dua indikator yaitu Adanya aturan yang jelas mengenai penetapan waktu masuk dan pulang kerja dan bagaimana ketaatan terhadap mekanisme dan prosedur kerja.

#### **16. *Komitmen pemimpin***

Dimensi selanjutnya adalah Komitmen pemimpin. Dimensi ini didukung oleh dua indikator yaitu adanya keinginan yang kuat untuk menjadi organisasi tertentu dan adanya kesediaan untuk teris meningkatkan kemampuan diri atas nama organisasi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa pelaksanaan proses koordinasi yang dilakukan oleh dinas Pariwisata dengan BPKD Kanupaten Ciamis dilaksanakan sesuai dengan teori yang dijadikan tolok ukurnya. Adapun proses yang dimaksud memnuhi unsur-unsur sebagai berikut

### 1. Proses kesatuan tindakan

Proses kesatuan tindakan dalam kegiatan koordinasi telah dilaksanakan melalui satu tindakan, saling menyesuaikan tugasnya antara Dinas Pariwisata dengan BP2D, sehingga kegiatan koordinasi dapat berjalan efektif.

### 2. Komunikasi

Proses komunikasi telah dilaksanakan dengan baik, dimana antar lembaga saling memberikan informasi yang jelas, serta adanya pembagian tugas..

### 3. Integrasi

Proses integrasi telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dengan BP2D, dengan dibutnya SOP yang jelas, maka proses koordinasi akan berjalan dengan baik. Sebab SOP menjadi salah satu jalan untuk membagi tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

### 4. Singkronisasi

Adanya pelaksanaan kejelasan pembagian tugas, dilakukan secara mandiri dan masing-masing organisasi memahami tugasnya masing-masing.

### 5. Simplikasi

Membuat program yang realistik dan sederhana telah dilaksanakan serta adaya satu tindakan, untuk saling menyesuaikan tugasnya antara dinas Pariwisata dengan BP2D.

### 6. Continuity

Kegiatan koordinasi yang berkesinambungan, telah dilakukan dan konnuitas menjadi salah satu proses pelaksanaan koordinasi..

### 7. Direct contact

Koordinasi langsung menjadi suatu keharusan dalam melaksanakan sbuah kebijakan dan sejauh ini Dinas Pariwisata dengan BP2D selalu menghindari kesalahpahaman dengan melakukan melalui kontak langsung.

### 8. *Reciprocal relation*

Dalam proses koordinasi anggota merasa saling membutuhkan, sebab keberadaany kedua instansi tersebut saling melengkapi dan semua anggota merasa saling berhubungan.

### 9. *Mutual repect*

selama ini antara pegawai selalu saling menghargai satu sama lain, dimana adanya ketentuan bersama terkait kesejahteraan antar pegawai yang merata sesuai tupoksi masing masing. Jadi tidak ada perbedaan yang membuat konflik terjadi.

### 10. *Clarity Of Objective*

Seluruh pegawai anggota organisasi mengetahui dengan jelas tujuan organisasi.

### 11. *Scalar Chain*

Garis kewenangan secara sistem Dispar menjadi kebijakan induk dalam hal mempromosikan detinasi wisata, namun tidak lepas dari konsep



pemasaran BP2D yang mempertebal kualitas promosi dan Laporan yang dibuat oleh pegawai dengan ditujukan kepada pemangku jabatan itu dengan berbagai laporan. Dari mulai laporan kegiatan, laporan perencanaan secara transparan. Mekanisme Dinas Pariwisata dengan BP2D, saling menyesuaikan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya dan Standar pelaksanaan kerja diatur dalam PERBUP NOMOR 68 TAHUN 2020 perihal pembentukan BP2D dan Juga PERBUP NOMOR 58 TAHUN 2016 terkait tugas fungsi dan tata kerja Dinas Pariwisata Kab. Ciamis. Standar pekerjaan antara Dispar dan bp2d itu di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020.

#### 12. Pembagian peran dan kinerja (role of the job sharing)

Dalam proses pembagian kerja antara masing-masing anggota organisasi, dilakukan dengan mengutamakan keahlian kerja pegawai dan dan sejauh ini pembagian tugas disesuaikan dengan pelaksanaan pekerjaannya. Dimana masing-masing organisasi memiliki JPBDES yang berbeda.

#### 13. Manajemen internal

Terdapat manajemen internal dalam masing-masing organisasi untuk mempermudah koordinasi. Dimana manajemen Dispar diketuai oleh Kepala Bidang Promosi dan Manajemen sedangkan BP2D doleyuai oleh ketua badan

#### 14. Disiplin

Masing-masing organisasi memiliki aturan yang jelas mengenai penetapan waktu masuk dan pulang kerja dan Prosedur kerja tentunya dijalankan oleh setiap pegawai . namun tentu saja adanya perbedaan budaya kerja yang membuat terus menerus membuat inovasi manajemen kerja.

#### 15. komitmen pemimpin.

Dispar maupun BP2D memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi organisasi tertentu, sebagai lembaga promosi pariwisata di Kabupaten Ciamis dan dan bahwa telah dilakukan peningkatan kemampuan diri atas nama organisasi, baik itu oleh Dispar maupun BP2D.

Hambatan masing-masing indikator dalam pelaksanaan koordinasi sebagian besar berawal dari sumber daya manusia yang ada pada dua lembaga tersebut yaitu Dinas pariwisata dan BP2D. Sedangkan hambatan lainnya terdiri dari sumber dana, serta sarana prasarana yang ada.

Upaya yang selalu dilakukan dalam penyelesaian hambatan masing-masing indikator adalah melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia. Sedangkan masalah dana dilakukan penganggaran dana serta sarana dilakukan terus menerus perbaikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Hartatmo. (2015). *Koordinasi Program Jaminan Sosial*. Kementrian koordinator bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan. Jakarta Direktorat PSDM.

Moleong. (2017) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: Alfabeta.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Yulesti (2017) *Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Angkasa